

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(B P B D)**

Jln. Suprpto No. 03 Telp. (0752) 4415568, Batusangkar 27219
Email : bpbd_tanah_datar@yahoo.co.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyampaian laporan kinerja merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi/ unit kerja yang disusun berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja yang memadai. Laporan kinerja merupakan media akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis organisasi, dan sarana umpan balik pelaksanaan perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta fungsi secara berkelanjutan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
I	Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,30	0,25	83,33 %
II	Menurunkan risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar	Indeks Risiko Bencana	123,92	219,49	56,46 %
III	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan BPBD	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (72)	BB (70,90)	98,47%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	98,30	98,30	100%
IV	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1 (Pengembangan)	1	100%

Capaian kinerja tersebut diatas didukung dengan anggaran sebesar Rp4.424.871.958,00 dengan realisasi sebesar Rp4.143.303.637,00 atau sebesar 93,64%.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar disusun guna memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

KATA PENGANTAR

Terselenggaranya **Good Governance** merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Tahun 2025, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar sebagai perangkat daerah yang transparan dan akuntabel

Batusangkar, Januari 2026

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Datar
Kepala Pelaksana,



Dr. ERMON REVLIN, MPH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690313 200212 1 005

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
B. PERAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	7
C. SISTEMATIKA LAPORAN.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS.....	9
B. PRIORITAS DAERAH	12
C. PERJANJIAN KINERJA..	14
D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. PENGUKURAN KINERJA	25
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	28
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN/REALISASI ANGGARAN..	38
BAB IV PENUTUP	46
A. KESIMPULAN.....	46
B. SARAN	46
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	Hal
1.1 SARANA DAN PRASARANA.....	5
2.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11
2.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG PRIORITAS DAERAH	12
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	15
2.4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SESUAI DOKUMEN ANGGARAN 2025.....	21
3.1 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025	25
3.2 PERBANDINGAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN TERAKHIR DAN RENSTRA BPBD TAHUN 2025-2029	26
3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025.....	28
3.4 MATRIKS SWOT INDEKS KETAHANAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR.....	31
3.5 MATRIKS SWOT INDEKS RISKO BENCANA KABUPATEN TANAH DATAR.....	33
3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN BPBD Tahun 2025.....	38

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Hal
1.1 STRUKTUR ORGANISASI.....	3

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK

1.1 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN	4
1.2 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN	4
1.3 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	5
3.1 REALISASI NILAI IKD BPBD TAHUN 2025	29
3.2 REALISASI NILAI IRB BPBD TAHUN 2025	32
3.3 REALISASI NILAI SAKIP BPBD TAHUN 2025	37

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar memiliki kewenangan menyelenggarakan perumusan dan penetapan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien serta menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar antara lain:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah secara berkala dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta mengkoordinir tenaga relawan.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

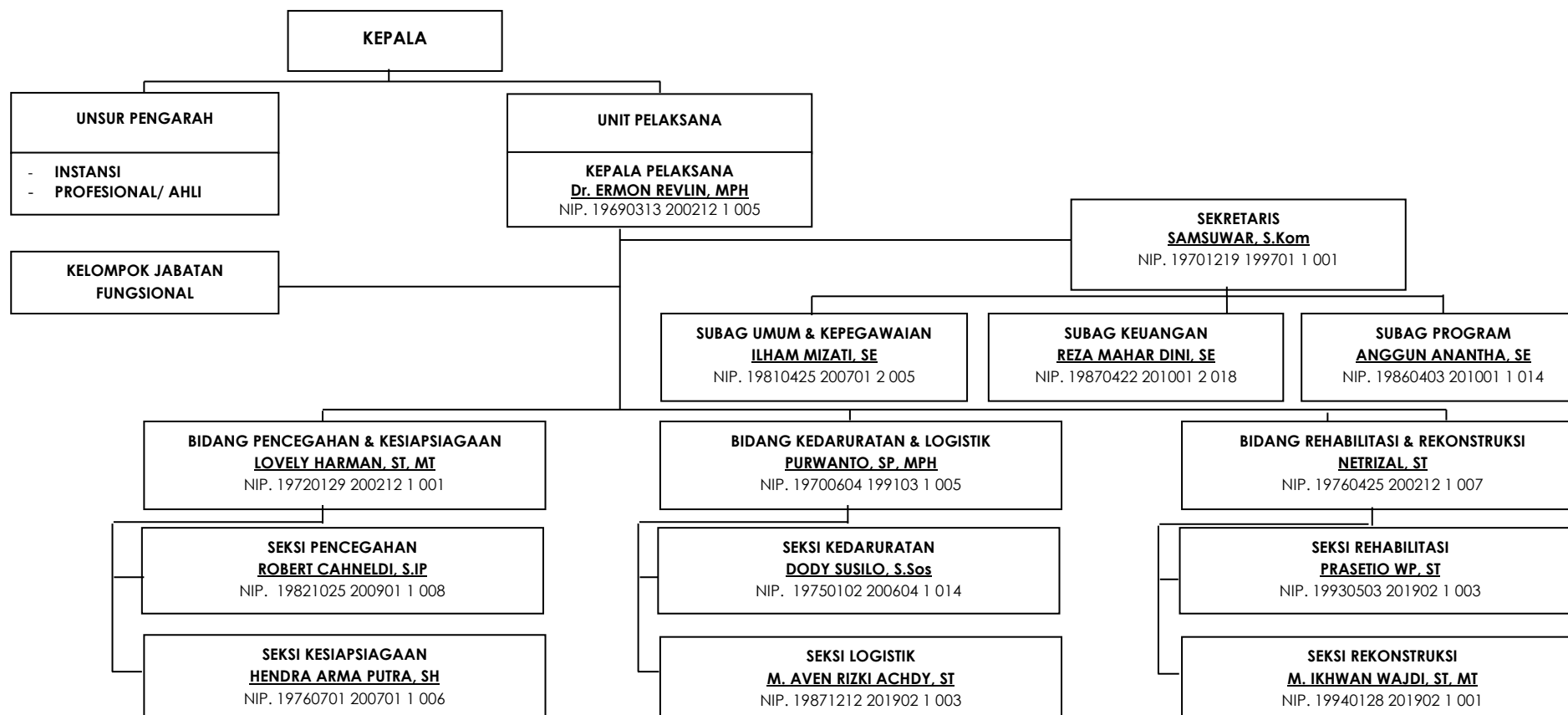
Untuk menyelenggarakan tugas kewenangan daerah diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2010 Nomor 5 seri D) ditetapkan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN TANAH DATAR
(Berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010)

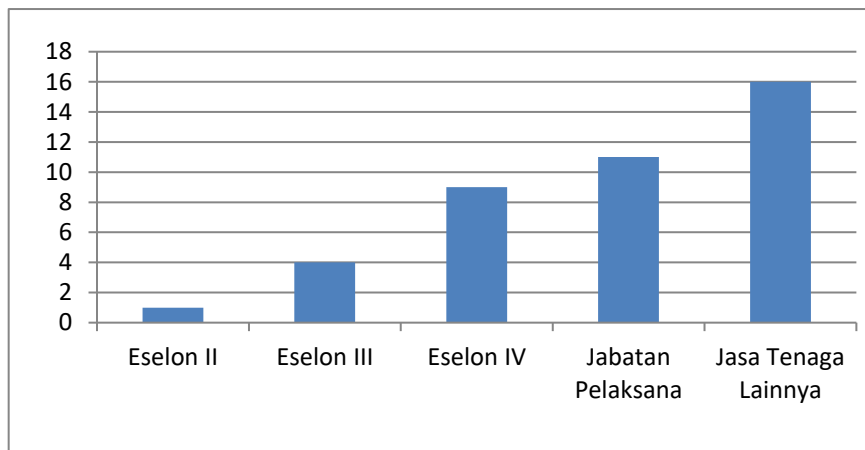


Susunan kepegawaian pada BPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dapat dikelompokkan dalam bezzeting pegawai dengan jumlah 41 orang, yang terdiri dari 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 16 Orang Jasa Tenaga Lainnya

1). Komposisi pegawai berdasarkan jabatan :

Berdasarkan komposisi jabatan pada BPBD Tahun 2025 terdapat 1 (satu) orang Esselon II, 4 (empat) orang Esselon III, 9 (Sembilan) orang Esselon IV, 11 (sebelas) orang Jabatan pelaksana dan 16 (enam belas) orang Jasa Tenaga Lainnya.

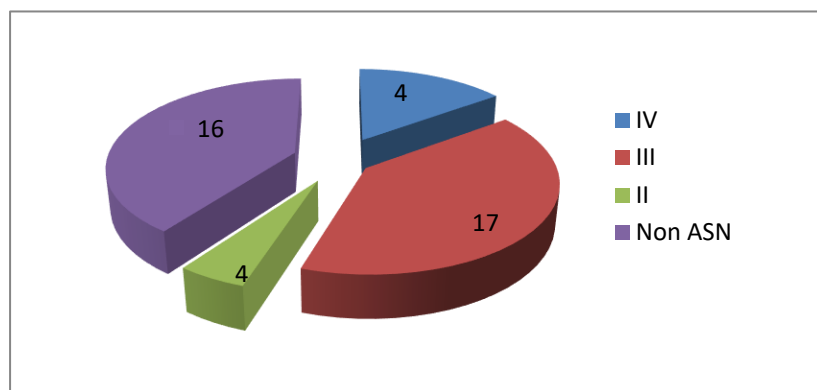
Grafik. 1.1
Komposisi pegawai berdasarkan jabatan



2). Komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan sebagai berikut :

Berdasarkan komposisi kepangkatan/golongan pegawai BPBD Tahun 2025 terdapat 4 (empat) orang Golongan IV, 17 (tujuh belas) orang Golongan III, 4 (empat) orang Golongan II dan 16 (enam belas) orang Jasa Tenaga Lainnya.

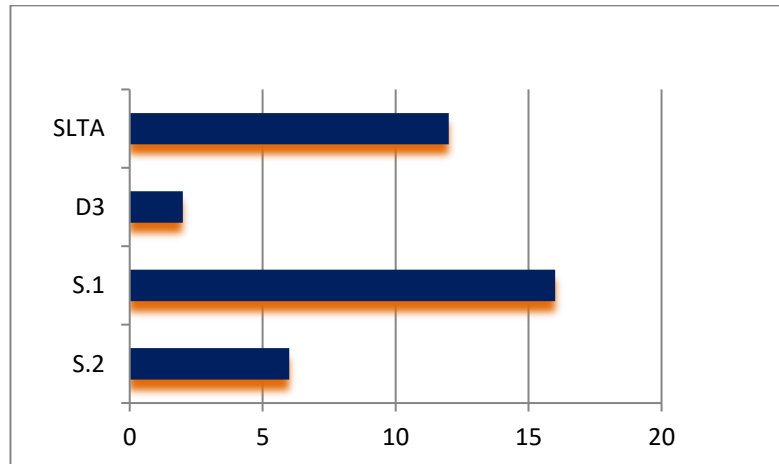
Grafik. 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kepangkatan/Golongan



3). Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Grafik. 1.3

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan



Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai pada BPBD dapat dikelompokkan menjadi tamatan S2 sebanyak 6 (enam) Orang, S1 sebanyak 16 (enam belas) orang, D3 sebanyak 2 (dua) orang dan SMA sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

4. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 1.1

Sarana dan prasarana

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1.	Mobil dinas roda 4	4
2.	Mobil Rescue	1
3.	Mobil L-300	1
4.	Mobil Tangki Air	1
5.	Mobil Dapur Lapangan	2
6.	Mobil Truk Serbaguna	1
7.	Mobil Ambulans	1
8.	Sepeda Motor Trail	6
9.	Sepeda Motor	1
10.	Perahu Karet	1
11.	Handy Talky	4
12.	RIG	1

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
13.	SSB	1
14	Tenda Posko	1
15.	Tenda Pleton	2
16.	Tenda Keluarga	2
17.	Tenda DUM	3
18	Tenda Komando Lapangan	2
19	Mesin potong Rumput	1
20.	Genset	5
21.	Velbed	30
22.	Lampu HID	1
23.	Chainsaw	8
24.	Personal Computer	4
25.	Note Book	7
26.	Printer	7
27.	Modem	1
28.	GPS	2
29.	Mesin Pompa Air	1
30.	Meja Lipat Posko	1
31.	Alat Perlengkapan Vertical Rescue	1
32.	Drone	1
33.	Televisi	2
34.	Kamera	1
35.	Kompas	2
36.	Wind Flow	1
37.	Pelampung	20
38.	Tandu Basket	6
39.	Teropong Binocular	1
40.	Peralatan evakuasi	3
41.	American Scuba (Tabung Oksigen)	2
42.	Petal/Croll	1
43.	Cressi/Bed	1
44.	Regulator Seat Pysindro	1
45.	Octopuis	1
46.	Console 2 Seat	1
47.	Wet Suit	1
48.	Fin Amscud Sigma	1
49.	Bootis Amscud Chalange	1
50.	Fin Cressi Fog	1

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
51.	Bootis Cressi Minorca	1
52.	Pisau Cressi Vigo	1
53.	Tas Cressi Jungle	1
54.	Mesin Pompa Air	2
55.	Pelampung Pompa Air	2
56.	Tiang + Lampu Penerangan	
57.	Perahu Politelin	2
58.	Tenda Pengungsi	2
59.	Mesin Perahu Tempel	5
60.	Mesin Absensi	1
61.	UPS	1
62.	Harddisk eksternal	1

B. PERAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah pegunungan, perbukitan, lembah dan dataran tinggi yang berpotensi terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunungapi marapi, tanah longsor, banjir bandang/galodo dan angin puting beliung/angin badai serta bencana kebakaran, baik pemukiman penduduk maupun lahan/hutan.

Dengan topografi daerah yang berbukit dan berlembah tersebut mengakibatkan Kabupaten Tanah Datar rentan terhadap kejadian bencana tersebut. Untuk itu sangat tepat sekali dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar, sehingga apabila terjadi bencana akan segera ditangani secara cepat dan tepat sehingga kerugian baik harta benda maupun jiwa dapat diminimalisir dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar juga berperan dalam Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.

C. SISTEMATIKA PENULISAN.

Untuk menggambarkan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) BPBD tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- B. PERAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
- C. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PRIORITAS DAERAH
- C. PERJANJIAN KINERJA
- D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. PENGUKURAN KINERJA
- B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- C. AKUNTABILITAS KEUANGAN/REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

A. Rencana Strategis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan Berdasarkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi, yaitu:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, Usaha Mikro dan peningkatan investasi.
4. Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
5. Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.
6. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah.
7. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

Dari uraian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, BPBD Kabupaten Tanah Datar sesuai tupoksi lebih mendukung pelaksanaan misi 5 (lima), yaitu “Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan”, dengan indikator “Indeks Risiko Bencana”, dengan:

1. Tujuan

Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, tangguh bencana, dan ramah lingkungan.

2. Sasaran

Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, bencana dan pasca bencana.

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, maka dirumuskanlah Tujuan BPBD Kabupaten Tanah Datar, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang tangguh terhadap bencana melalui penguatan sistem manajemen risiko bencana yang terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan”.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dirumuskan dan ditetapkan sasaran BPBD Kabupaten Tanah Datar, sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana dengan indikator Indeks ketahanan Daerah;
2. Menurunkan risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar dengan indikator Indeks Risiko Bencana;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator:
 - a. Predikat Akuntabilitas Kinerja
 - b. Survei Kepuasan Masyarakat
4. Terwujudnya Inovasi yang berkelanjutan dengan indikator Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan

Berikut dapat dilihat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah seperti tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang tangguh terhadap bencana melalui penguatan system manajemen risiko bencana yang terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan	Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana dengan indikator Indeks ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,30	0,32	0,35	0,37	0,40
		Menurunkan risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar	Indeks Risiko Bencana	123,92	123,91-122,64	122,63-121,36	121,35-120,08	120,07-117,52
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (72)	BB (72,5)	BB (73)	BB (73,5)	BB (74)
		Survei Kepuasan Masyarakat	98,30	98,35	98,40	98,45	98,50	
	Terwujudnya Inovasi yang berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	1	1	1	

B. Prioritas Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu perangkat daerah yang masuk kedalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar masuk pada Misi 5 (Lima), yaitu “Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan” dengan indikator “Indeks Risiko Bencana”, dengan tujuan “Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, tangguh bencana, dan ramah lingkungan” dan sasaran “Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, bencana dan pasca bencana”.

Untuk mencapai misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2025-2029 tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menunjang prioritas daerah ini adalah:

Tabel 2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang Prioritas Daerah

PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah A. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD B. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD	2 Dokumen 4 Laporan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah A. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. B. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD	25 Org/Bln 2 Laporan

PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah A. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan. B. Penyediaan Bahan Logistik Kantor C. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan D. Fasilitasi Kunjungan Tamu E. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD	4 Paket 4 Paket 4 Paket 12 Laporan 1 Laporan
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah A. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kegiatan Penunjang OPD	7 Unit
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah A. Penyediaan Jasa Surat Menyurat B. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik C. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah A. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. B. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. C. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD	18 Unit 19 Unit 2 Unit
II. Program Penanggulangan Bencana		
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota A. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Penunjang OPD	1.000 Orang
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana. A. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota. B. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota C. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota D. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana E. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD	1 Dokumen 75 Orang 1 Laporan 3 Unit 1 Kawasan

PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana A. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Penunjang OPD	100 Orang
4. Penantaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana A. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana	Kegiatan Penunjang OPD	1 Kegiatan

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahun 2025 yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar. Penyusunan perjanjian ini bermanfaat bagi Kepala Daerah dan Kepala Dinas untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel dibawah berikut.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)
1.	Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,30
2.	Menurunkan risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar	Indeks Risiko Bencana	123,92
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan BPBD	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (72)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	98,30
4.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1

Berikut ini merupakan penjelasan masing-masing sasaran dan indikator yang tertuang pada Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2025, sebagai berikut:

Sasaran 1 :

“Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana”

Indikator Kinerja : Indeks Ketahanan Daerah.

1. Program Penanggulangan Bencana

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Sub Kegiatan Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Output Sub kegiatan ini berupa pemberian layanan informasi rawan bencana kepada masyarakat melalui media sosial, media cetak dan radio, dengan target 1.000 orang.

b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Ada beberapa sub kegiatan untuk mencapai sasaran ini diantaranya adalah:

(1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dengan target 1 dokumen.

(2) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota.

Output Sub kegiatan ini berupa terlaksananya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kepada Aparatur Sipil Negara dan Instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana dengan target 75 orang peserta pelatihan.

Sasaran 2 :

“Menurunkan risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar”

Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana

1. Program Penanggulangan Bencana

a. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Ada 2 (dua) sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran ini :

1. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Output Sub kegiatan ini berupa jumlah laporan layanan Pusdalops sesuai dengan jenis ancamannya. Selain output sub kegiatan ini adalah terlaksananya piket siaga bencana dan operasional kedaruratan oleh Pusdalops PB BPBD. Target dari kegiatan ini adalah 1 laporan.

2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Output Sub kegiatan ini berupa tersedianya rambu-rambu bencana dan papan informasi bencana yang akan dipasang pada titik-titik rawan bencana. Target sub kegiatan ini adalah 3 unit

b. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Output Sub kegiatan ini berupa tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target 100 orang

c. Kegiatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana

(1) Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana

Output Sub kegiatan ini berupa dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) dengan target 1 kegiatan.

Sasaran 3 :

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan BPBD”

Indikator Kinerja : 1. Predikat akuntabilitas kinerja
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terdapat 2 (dua) sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran ini sebagai berikut :

(1) Sub Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Perencanaan Perangkat Daerah.

Sub kegiatan ini berupa penyusunan 2 dokumen, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).

(2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Sub kegiatan ini berupa penyusunan 4 Laporan Kinerja, yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), dan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdapat 2 (dua) sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran ini sebagai berikut :

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini berupa penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2025 dengan target sebanyak 25 orang ASN/PNS.

(2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD

Sub kegiatan ini berupa penyusunan 2 laporan, yaitu laporan keuangan Semester dan laporan keuangan akhir Tahun

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdapat 5 (lima) sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran ini sebagai berikut:

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Output Sub kegiatan ini berupa tersedianya alat-alat listrik dan komponen listrik.

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Output Sub kegiatan ini berupa tersedianya alat-alat tulis kantor dan bahan-bahan komputer.

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Output Sub kegiatan ini berupa tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan dinas.

(4) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Output Sub kegiatan ini berupa tersedianya makanan dan minum rapat dan tamu.

(5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Output Sub kegiatan ini berupa belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 1 tahun.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdapat 1 (satu) sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran ini sebagai berikut:

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Output sub kegiatan ini berupa pengadaan peralatan mesin lainnya untuk kebutuhan BPBD sebanyak 7 (tujuh) unit.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran ini sebagai berikut:

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output Sub kegiatan ini berupa tersedianya 150 lembar Materai 10.000.

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Output Sub kegiatan ini berupa pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Output Sub kegiatan ini berupa tersedianya alat dan peralatan kebersihan serta pembayaran 1 (satu) orang tenaga jasa lainnya.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran ini sebagai berikut:

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Output Sub kegiatan ini berupa tersedianya suku cadang, BBM dan Pelumas dan biaya perbaikan/Servis serta pembayaran pajak terhadap 3 (tiga) unit kendaraan roda enam, 8 (delapan) unit kendaraan roda empat, dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua.

(2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Output Sub kegiatan ini berupa terpeliharanya 19 unit peralatan kantor.

(3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.

Output Sub kegiatan ini berupa terpeliharanya 2 (dua) unit gedung kantor.

Sasaran 5 :

“Terwujudnya inovasi berkelanjutan”

Indikator Kinerja Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan

D. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 - 2029 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang akan dicapai. Program kegiatan pada RENJA 2025 mengacu pada Program dan Kegiatan

RENSTRA. Hal ini sebagai bentuk konsistensi antara RENJA dengan RENSTRA.

Penyusunan Dokumen RENJA BPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 berdasarkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dokumen Rencana Kerja terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan.

Rencana kerja dan anggaran tahun 2025 pada BPBD, akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Periode 2025-2029 dan berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD, serta visi Kepala Daerah. Berikut Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan pada BPBD tahun 2025 dengan total Anggaran Sebesar **Rp. 4.424.871.958,00 (Empat milyar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)**. Rincian program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai
Dokumen Anggaran Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.508.006.399
I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.000.000
C. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1,500,000
D. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kegiatan Penunjang OPD	4 Laporan	4 Laporan	100	1,500,000

PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah C. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. D. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD	25 Org/Bln 2 Laporan	25 Org/ Bln 2 Laporan	100 100	2,887,156,399 2.885.656.399 1.500.000
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah F. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan. G. Penyediaan Bahan Logistik Kantor H. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan I. Fasilitasi Kunjungan Tamu J. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD	4 Paket 4 Paket 4 Paket 12 Laporan 1 Laporan	4 Paket 4 Paket 4 Paket 12 Laporan 1 Laporan	100 100 100 100 100	30,000,000 1,500,000 9,000,000 4,500,000 2,000,000 13,000,000
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah A. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kegiatan Penunjang OPD	7 Unit	7 unit	100	46,000,000 46,000,000
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah D. Penyediaan Jasa Surat Menyurat E. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik F. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	100 100 100	68,700,000 1,500,000 40,200,000 27,000,000
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah D. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. E. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. F. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD Kegiatan Penunjang OPD	18 Unit 19 Unit 2 Unit	18 Unit 19 Unit 2 Unit	100 100 100	473,150,000 177,150,000 21,000.000 275.000.000
II. Program Penanggulangan Bencana					916.865.559
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota B. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Penunjang OPD	1.000 Orang	1.000 Orang	100	5.257.500 5.257.500

PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.					528.257.700
F. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.	Kegiatan Penunjang OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	8.287.500
G. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Penunjang OPD	75 Orang	75 Orang	100	14.705.500
H. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Penunjang OPD	1 Laporan	1 Laporan	100	484.615.200
I. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kegiatan Penunjang OPD	3 Unit	3 Unit	100	13.000.000
J. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kegiatan Penunjang OPD	1 Kawasan	0 Kawasan	60	7,650,000
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					1.000.000
B. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Penunjang OPD	100 Orang	100 Orang	100	1.000.000
4. Penantaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					382.350.359
B. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana	Kegiatan Penunjang OPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	382.350.359
JUMLAH					4.424.871.958

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar disusun berbasis anggaran kinerja dengan tolak ukur indikator kinerja, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini akan menganalisa efisiensi, efektifitas, keberhasilan, kemajuan dan kegagalan pencapaian target kinerja dan strategi mengatasinya sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Dalam menetapkan indikator kinerja dilandaskan pada hasil perumusan Rencana Strategis yang meliputi tujuan, sasaran dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

A. Pengukuran Kinerja

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1
Pencapaian Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
I	Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,30	0,25	83,33 %
II	Menurunkan risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar	Indeks Risiko Bencana	123,92	219,49	56,46 %
III	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan BPBD	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (72)	BB (70,90)	98,47%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	98,30	98,30	100%
IV	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa pencapaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 diindikasikan **sangat baik**. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar semuanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kecuali untuk indikator Indeks Risiko Bencana dimana capaiannya 56,46%, hal ini disebabkan tingginya frekuensi bencana yang terencana serta letak geografis Kabupaten Tanah Datar yang rawan terhadap bencana.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang dievaluasi dengan tahun lalu dan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.2
Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Terakhir dan
Dengan renstra BPBD Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025			Target Renstra	Capaian (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
Sasaran I : Meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana									
1.	Indeks Ketahanan Daerah	-	-	-	0,30	0,25	83,33	0,30	83,33
Sasaran 2 : Menurunkan risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar									
1.	Indeks Risiko Bencana	125,20	125,20	100	123,92	219,49	56,46	123,92	56,46
Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan BPBD									
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (71)	BB (70,90)	99%	BB (72)	BB (70,90)	98,47	BB (72)	98,47
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	98,30	98,30	100	98,30	100
Sasaran 4 : Terwujudnya inovasi berkelanjutan									
1.	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100	1	1	100	1	100

Capaian Kinerja berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketangguhan menghadapi Bencana dengan indikatornya : Indeks Ketahanan Daerah.

Indikator ini pada Tahun 2025 terealisasi 83,33%. Pada Tahun Anggaran berjalan, indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) ditargetkan sebesar 0,30, namun realisasi yang dicapai sebesar 0,25. Capaian sebesar 0,25 menunjukkan bahwa ketahanan daerah berada pada kategori cukup, namun masih memerlukan penguatan pada beberapa komponen utama untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Menurunkan risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar dengan indikatornya: Indeks Risiko Bencana

Pada Tahun Anggaran berjalan, target Indeks Risiko Bencana (IRB) ditetapkan sebesar 123,92, sedangkan realisasi mencapai 219,49. Perlu dipahami bahwa pada indikator IRB, semakin rendah nilai indeks maka semakin baik, karena menunjukkan tingkat risiko bencana yang lebih kecil. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan, sehingga indikator ini belum tercapai dan memerlukan perhatian serius

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikatornya: 1. Predikat Akuntabilitas Kinerja, dan 2. Survei Kepuasan Masyarakat.

Pada Tahun Anggaran berjalan, target Nilai SAKIP BPBD ditetapkan sebesar BB (72), sedangkan realisasi yang diperoleh adalah BB (70,90). Walaupun secara numerik belum mencapai target 72, BPBD tetap mempertahankan kategori “BB”, yang menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja sudah berjalan dengan baik dan terukur. Pada indikator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), target yang ditetapkan sebesar 98,30, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 98,30. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan BPBD kepada masyarakat berada pada tingkat yang sangat memuaskan dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

4. Terwujudnya inovasi berkelanjutan dengan indikatornya : Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan

Inovasi yang telah dilakukan oleh BPBD adalah membuat aplikasi SIPELANA (Sistem Pelayanan Kebencanaan) yang merupakan aplikasi untuk memudahkan dalam penanganan kebencanaan.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2025 ini telah melakukan Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana kepada seluruh Nagari di Kabupaten Tanah Datar yang bisa dijadikan acuan dalam rangka memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga pengurangan risiko bencana dapat dilakukan. Selain itu pada akhir Tahun 2025 terjadi bencana dengan skala besar di Kabupaten Tanah Datar yang menyebabkan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Datar juga berhasil ditanggulangi dengan meminimalisir korban bencana

Tabel. 3.3
Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Kriteria
I	1. Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,30	0,25	83,33 %	
	2. Menurunkan risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar	Indeks Risiko Bencana	123,92	219,49	56,46 %	
	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan BPBD.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (72)	BB (70,90)	98,47%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	98,30	98,30	100%	
4. Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1 (Pengembangan)	1	100%		

1. Sasaran Meningkatnya ketangguhan Menghadapi Bencana dengan Indikator sasaran Indeks Ketahanan Daerah dengan realisasi 83,33%. Nilai indeks Ketahanan Daerah dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana setiap tahun yang bias di upload pada portal <https://inarisk.bnpb.go.id/admin>

Grafik 3.1 Realisasi Nilai IKD Tahun 2025



Indeks Ketahanan Daerah merupakan indikator komposit yang menggambarkan tingkat kesiapsiagaan, kapasitas, dan kemampuan daerah dalam menghadapi risiko bencana, meliputi aspek:

- a. Kelembagaan dan Regulasi
- b. Perencanaan dan penganggaran PRB
- c. Kapasitas sumber daya manusia
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana
- e. Sistem peringatan dini

Gambar 3.1 Sistem Peringatan Dini / Early warning System (EWS) yang terpasang untukantisipasi banjir lahar dingin Gunung Api Marapi



Faktor pendorong

Walaupun target IKD belum sepenuhnya tercapai, terdapat beberapa faktor positif yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas ketahanan daerah, yaitu:

- a. Penguatan Kelembagaan Kebencanaan
- b. Peningkatan Kapasitas SDM dan Relawan
- c. Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Informasi

Capaian IKD sebesar 0,25 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas ketahanan daerah yang didorong oleh penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dukungan kebijakan dan anggaran, serta pengalaman dalam penanganan bencana. Meskipun belum mencapai target 0,30, fondasi sistem ketahanan telah terbentuk dan menjadi modal utama untuk peningkatan indeks pada tahun berikutnya.

Faktor penghambat

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target antara lain:

- a. Keterbatasan alokasi anggaran mitigasi dan kesiapsiagaan, yang masih lebih dominan terserap untuk penanganan darurat dan rehabilitasi pascabencana.
- b. Belum optimalnya integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam dokumen perencanaan seluruh OPD.
- c. Kapasitas SDM kebencanaan yang belum merata, baik di tingkat kabupaten maupun nagari/desa.
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, termasuk peralatan logistik dan sistem informasi kebencanaan
- e. Frekuensi kejadian bencana yang tinggi, sehingga fokus sumber daya lebih banyak pada respons darurat dibanding penguatan sistem ketahanan

Faktor antisipasi

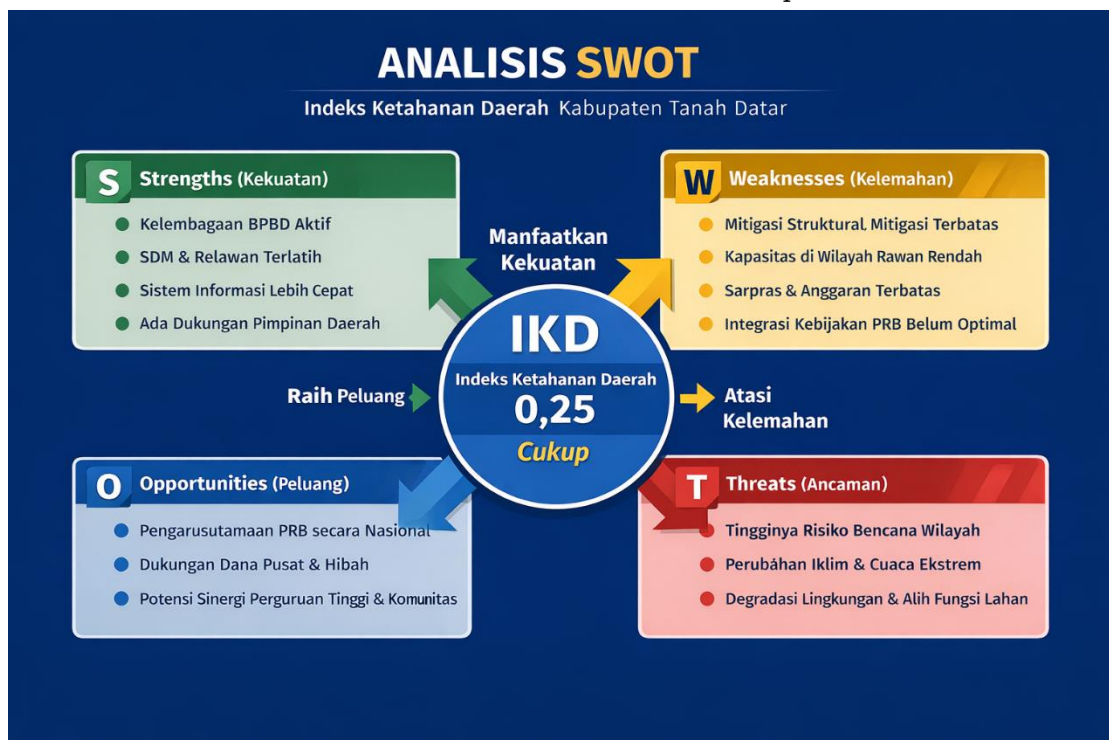
Untuk meningkatkan capaian IKD pada tahun berikutnya, BPBD akan melakukan langkah strategis sebagai berikut:

- a. Mendorong integrasi PRB dalam RKPD dan Renja seluruh OPD.
- b. Penguatan regulasi dan kebijakan daerah terkait mitigasi dan kesiapsiagaan

- c. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, simulasi, dan pembentukan Desa/Nagari Tangguh Bencana.
- d. Penguatan sistem peringatan dini dan pemutakhiran data risiko bencana secara periodic
- e. Peningkatan alokasi anggaran mitigasi dan kesiapsiagaan dalam APBD

Meskipun realisasi IKD sebesar 0,25 belum mencapai target 0,30, capaian ini menunjukkan adanya progres dalam penguatan sistem ketahanan daerah. Ke depan, diperlukan komitmen lintas sektor dan peningkatan dukungan anggaran serta kebijakan untuk mendorong peningkatan indeks secara berkelanjutan.

Tabel 3.4 Matriks SWOT Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Tanah Datar



2. Sasaran Menurunkan risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar dengan indikatornya Indeks Risiko Bencana.

Sasaran menurunkan risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar dengan Indikator sasaran Indeks Risiko Bencana dengan realisasi 56,46%. Nilai indeks Risiko Bencana dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana setiap tahun yang bisa di upload pada portal <https://inarisk.bnpb.go.id/admin> bersamaan dengan nilai Indeks Ketahanan Daerah.

Grafik 3.2 Realisasi Nilai IRB BPBD Tahun 2025



Indeks risiko bencana merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana disuatu daerah (Hazard + kerentanan – kapasitas).

Gambar 3.2 Penanganan Bencana di Kabupaten Tanah Datar



Faktor Pendorong

Tingginya Indeks Risiko Bencana bukan menunjukkan kegagalan kinerja, tetapi menunjukkan:

- Tingginya paparan risiko wilayah
- Pentingnya investasi jangka panjang pada mitigasi
- Kebutuhan pendekatan lintas sector

Oleh karena itu, penguatan IKD menjadi instrumen utama untuk menurunkan IRB secara bertahap.

Faktor Penghambat

Sedangkan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:

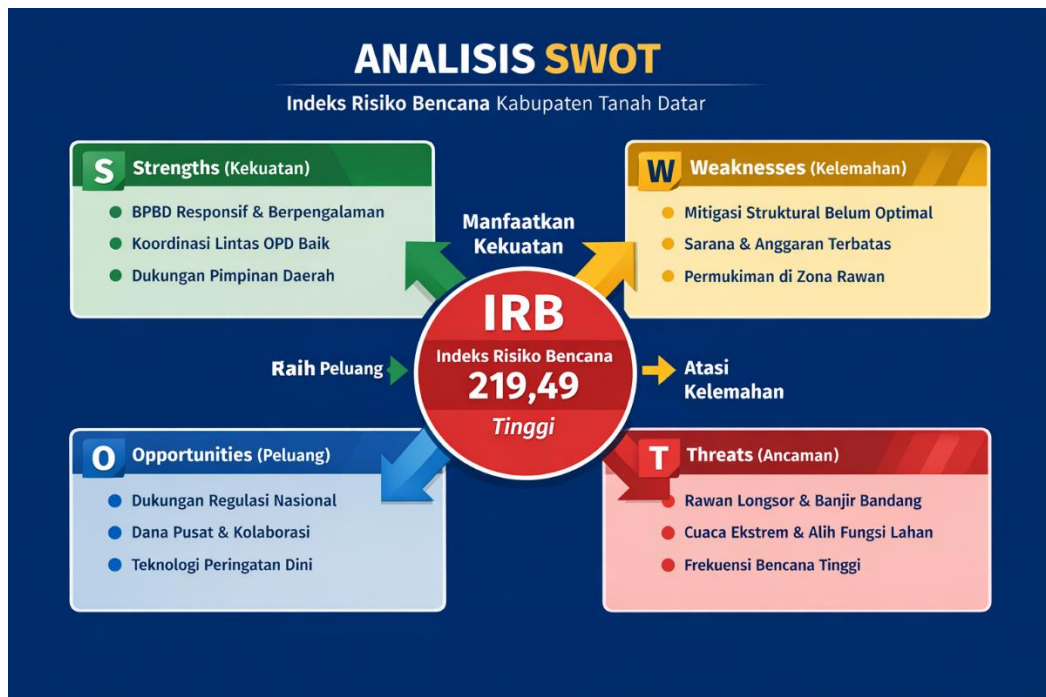
- a. Karakteristik geografis dan topografi Tanah Datar yang rawan terhadap banjir bandang, longsor, dan pergerakan tanah
- b. Frekuensi kejadian bencana yang cukup tinggi, yang berdampak pada peningkatan indeks risiko
- c. Tingginya tingkat kerentanan masyarakat dan infrastruktur, terutama di wilayah rawan bencana
- d. Belum optimalnya upaya mitigasi struktural dan non-struktural, seperti penguatan tata ruang berbasis risiko
- e. Perubahan iklim dan cuaca ekstrem, yang meningkatkan potensi bahaya (hazard)

Faktor Antisipasi

Untuk menurunkan IRB pada tahun berikutnya, langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

- a. Penguatan integrasi kajian risiko bencana dalam RTRW dan dokumen perencanaan daerah.
- b. Peningkatan program mitigasi struktural (normalisasi sungai, penguatan tebing, sistem drainase)
- c. Pengembangan Desa/Nagari Tangguh Bencana.
- d. Peningkatan edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat
- e. Penguatan sistem peringatan dini dan pemutakhiran data risiko bencana.

Tabel 3.5 Matriks SWOT Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tanah Datar



Realisasi IRB sebesar **219,49** yang melebihi target **123,92** menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar masih relatif tinggi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen lintas perangkat daerah serta peningkatan intervensi mitigasi untuk menurunkan tingkat risiko secara bertahap dan berkelanjutan.

3. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan BPBD dengan indikatornya 1) predikat akuntabilitas kinerja, 2) Indeks Kepuasan masyarakat.

- 1) Predikat akuntabilitas kinerja

Indikator ini merupakan Nilai Sakip perangkat daerah, dimana BPBD memperoleh nilai BB (70,90), sedangkan target Tahun 2025 adalah BB (72) atau terealisasi 98,47%. Rincian penilaian tersebut sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30	21,90
3	Pelaporan Kinerja	15	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	70,90
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP pada BPBD Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

BPBD telah mempunyai dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek dan telah didukung dengan perjanjian kinerja dari Eselon II, III, IV dan fungsional. Selain itu BPBD telah membuat *cascading* dan *crosscutting* yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan dengan kondisi kerja yang akan dicapai dan setiap satuan kerja dan pegawai telah menetapkan perencanaan kinerja yang harus dicapai, Namun dalam perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan sebelumnya belum terdokumentasi dengan baik.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja telah dilakukan dan dipantau secara berkala, pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi), namun aplikasi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam melakukan pengukuran kinerja, karena aplikasi ini hanya dimanfaatkan untuk mengumpulkan data. Dari Laporan Akuntabilitas BPBD masih ada target yang belum tercapai dan perbandingan realisasi kinerja pada laporan hanya menyajikan realisasi kinerja yang dievaluasi dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

c. Pelaporan Kinerja

BPBD telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024, laporan kinerja telah menyajikan realisasi kinerja, telah diformalkan, telah dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Namun yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja informasi dalam laporan kinerja ini adalah:

1. Pada BAB III, akuntabilitas kinerja dalam dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya menampilkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah serta belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
2. Pada BAB III, akuntabilitas kinerja dalam dokumen laporan kinerja juga belum dilengkapi dengan grafik capaian kegiatan.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh BPBD. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang didukung dengan dokumen hasil evaluasi berupa notulen hasil rapat dan daftar hadir peserta yang dilaksanakan per-triwulan, namun evaluasi internal belum dilakukan secara berjenjang.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BPBD Tahun 2024, Inspektorat memberikan rekomendasi:

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen laporan kinerja untuk menampilkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, serta menampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan laporan kinerja dilengkapi dengan grafik capaian kegiatan (BAB III Akuntabilitas Kinerja).
- b. Evaluasi internal agar dilakukan secara berjenjang dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas kinerja.

Dari hasil rekomendasi inspektorat diatas dapat kami sampaikan bahwa pada Tahun 2025 BPBD akan:

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen laporan kinerja untuk menampilkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, serta menampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan laporan kinerja dilengkapi dengan grafik capaian kegiatan (BAB III Akuntabilitas Kinerja).

- b. Melakukan Evaluasi internal yang dilakukan secara berjenjang dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas kinerja.

Grafik 3.3 Nilai Sakip BPBD Tahun 2025



2) Indeks Kepuasan masyarakat

Pada indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)**, target yang ditetapkan sebesar **98,30**, dan realisasi yang dicapai juga sebesar **98,30**. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan BPBD kepada masyarakat berada pada tingkat yang sangat memuaskan dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan pada aspek risiko dan ketahanan daerah, dari sisi pelayanan publik BPBD tetap mampu memberikan pelayanan yang optimal dan mendapat kepercayaan masyarakat.

4. Sasaran terwujudnya inovasi berkelanjutan dengan indikatornya : Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan. Inovasi yang telah dilakukan oleh BPBD adalah membuat aplikasi SIPELANA (Sistem Pelayanan Kebencanaan) yang merupakan aplikasi untuk memudahkan dalam penanganan kebencanaan.

Aplikasi ini pada Tahun 2025 telah coba digunakan, tetapi masih ada kendala dalam pengaplikasiannya seperti dalam mengakses formulir laporan bencana masih membingungkan bagi masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menyempurnakan aplikasi agar benar-benar bisa membantu dalam penanganan bencana sehingga aplikasi ini benar-benar bisa digunakan secara berkelanjutan.

Dari hasil pengukuran dan capaian kinerja diatas dapat dinilai capaian sasaran strategis BPBD dengan kategori penilaian **Sangat baik**.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN/REALISASI ANGGARAN

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPBD Kabupaten Tanah Datar menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025. Faktor keuangan yang tersedia merupakan salah satu pendukung utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

Untuk mempermudah dalam mengevaluasi realisasi penggunaan anggaran dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan analisis dengan memaparkannya dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel. 3.6
Akuntabilitas Keuangan BPBD Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Pelaksanaan Program Pembangunan Yang Berkesinambungan, Terarah dan Terintegrasi Dalam Penanggulangan Bencana Secara Profesional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan BPB	Program Penunjang urusan Peemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.508.006.399	3.276.206.658	93,39%
		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.000.000	2.991.100	99,70%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1.500.000	1.499.000	99,93%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.500.000	1.492.100	99,47%

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.887.156.399	2.670.637.229	92,50%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2.885.656.399	2.669.140.229	92,50%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.500.000	1.497.000	99,80%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah			0	0	0%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0	0	0%
		Administrasi Umum Perangkat daerah			30.000.000	29.860.828	99,54%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.500.000	1.500.000	100%
		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang		9.000.000	8.979.000	99,77%

		Kantor	Disediakan				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4.500.000	4.479.916	99,55%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		2.000.000	1.997.600	99,88%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		13.000.000	12.904.312	99,26%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			46.000.000	45.825.000	99,62
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan		46.000.000	45.825.000	99,62
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah			68.700.000	64.064.754	93,25%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.500.000	1.500.000	100,00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang		40.200.000	35.566.854	88,47%

			Disediakan				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		27.000.000	26.997.900	99,99%
		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah			473.150.000	462.827.747	97,82%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		177.150.000	168.547.790	95,14%
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		21.000.000	20.892.235	99,49%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		275.000.000	273.387.722	99,41%

Meningkatnya ketangguhan Menghadapi Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			916.865.559	867.096.979	94,57%
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			5.257.500	4.915.900	93,50%
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		5.257.500	4.915.900	93,50%
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			528.257.700	521.565.802	98,73%
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi		8.287.500	8.010.550	96,66%
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan		14.705.500	14.245.750	96,88%

			Pencegahan dan Mitigasi				
Menurunkan risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		484.615.200	482.308.377	99,52%	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas		13.000.000	12.587.625	96,83%	
	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang disiapkan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		7.650.000	4.413.500	57,69	
Meningkatnya Kecepatan/Respon Penanganan Kedaruratan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1.000.000	994.650	99,47%	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1.000.000	994.650	99,47%	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			382.350.359	339.620.627	88,82%	

		Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen R3P yang disiapkan		382.350.359	339.620.627	88,82%
--	--	---	--------------------------------------	--	-------------	-------------	--------

BAB. IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) serta semua dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 telah berjalan dengan baik, realisasi keuangan yang dicapai adalah 93,64% sedangkan realisasi kinerja menurut sasaran dan program/kegiatan adalah sebesar 100%. Dari hal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa semua program/ kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.

B. SARAN.

Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025, masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan untuk pencapaian kinerja dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal terutama bagi masyarakat yang terkena bencana dan masyarakat yang rawan bencana. Perbaikan tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui peningkatan kapasitas personil BPBD .
2. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat baik dari segi pelayanan maupun sarana dan prasarana.

Akhirnya kami menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2025 ini tidak terlepas dari partisipasi,

dukungan dan kerjasama dari semua staf BPBD Kabupaten Tanah Datar serta dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Oleh sebab itu demi penyempurnaan program dan kegiatan di masa mendatang kami menerima masukan-masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Atas segala bimbingan, arahan, dukungan, kerjasama dan masukan tersebut, akhirnya kami ucapkan terima kasih.

Batusangkar, Januari 2026

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Datar
Kepala Pelaksana,



Dr. ERMON REVLIN, MPH
NIP. 19690313 200212 1 005

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

**DOKUMENTASI KEGIATAN BPBD
DALAM PENANGANAN BENCANA DI KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2025**



DOKUMENTASI KEGIATAN OPERASI PEMADAMAN KARHUTLA



DOKUMENTASI KEGIATAN OPERASI PEMBERSIHAN MATERIAL LONGSOR



DOKUMENTASI KEGIATAN OPERASI POHON TUMBANG



DOKUMENTASI KEGIATAN OPERASI PENCARIAN ORANG HILANG



DOKUMENTASI KEGIATAN OPERASI PENANGANAN BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR

Lampiran 2



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ERMON REVLIN, MPH
Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKA PUTRA, SE., MM
Jabatan : BUPATI TANAH DATAR

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan:

1. Bersikap patuh dan loyal kepada Atasan;
2. Berperan aktif dalam mensukseskan seluruh Program Pemerintah;
3. Bersikap transparan, jujur, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak terlibat dalam perbuatan tercela;
5. Mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
6. Bertanggung jawab penuh dalam pencapaian dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


EKA PUTRA

Batusangkar, Oktober 2025
Pihak Pertama,


dr. ERMON REVLIN, MPH
NIP.19690313 200212 1 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,30
2.	Menurunkan risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar	Indeks Resiko Bencana	123,92
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan BPBD	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (72)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	98,30
4.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1 (Pengembangan)

PROGRAM	ANGGARAN PADA APBD TAHUN 2025	ANGGARAN PADA APBD PERUBAHAN TAHUN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG
JUMLAH ANGGARAN	Rp. 5.956.284.681	Rp. 4.424.871.958	(Rp.1.531.412.723)
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp. 3.489.940.329	Rp. 3.508.006.399	Rp. 18.066.070
2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 2.466.344.352	Rp. 916.865.559	Rp. 1.549.478.793)

Batusangkar, Oktober 2025

BUPATI TANAH DATAR,



EKA PUTRA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,



dr. ERMON REVLIN, MPH
NIP. 19690313 200212 1 005

Lampiran 3



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(B P B D)

Jln. Suprpto No. 03 Telp. (0752) 574647 Fax. 574647, Batusangkar 27219
Yahoo Email : bpbd_tanah_datar@yahoo.co.id / Gmail : bpbdtanahdatar.trc@gmail.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 800/09/BPBD-2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berguna untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan sebagaimana tersebut huruf a di atas perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembara Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
17. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dan lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana tersebut diktum kesatu bertugas :
1. Menghimpun seluruh capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam satu tahunan anggaran sesuai dengan visi dan misi organisasi.
 2. Menyusun semua capaian kinerja dimaksud kedalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dan sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna percepatan penyusunan laporan.
- KETIGA : Tim Penyusunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR



dr. ERMON REVLIN, MPH
NIP. 19690313 200212 1 005

Tembusan : Kepada Yth.
Yth. 1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar
2. Wakil Bupati Tanah Datar di Batusangkar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH
DATAR

NOMOR : 800/09/BPBD-2026
TANGGAL : 5 JANUARI 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN
2025

TIM PENYUSUNAN LKjIP
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1.	dr. ERMON REVLIN, MPH	Kepala Pelaksana	Penanggungjawab
2.	SAMSUWAR, S.Kom	Sekretaris	Wakil Penanggungjawab
3.	LOVELY HARMAN, ST, MT	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Koordinator Pokja I : Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4.	ROBERT CAHNELDI, S.IP	Kasi Pencegahan	Anggota
5.	HENDRA ARMA PUTERA, SH	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
6.	PURWANTO, SP, M.Ph	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Koordinator Pokja II: Bidang Kedaruratan dan Logistik
7.	DODY SUSILO, S.Sos	Kasi Kedaruratan	Anggota
8.	M. AVEN RIZKI ACHDY, ST	Kasi Logistik	Anggota
9.	NETRIZAL, ST, MT	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Koordinator Pokja III: Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
10.	M. IKHWAN WAJDI, ST, MT	Kasi Rekonstruksi	Anggota
11.	PRASETIO WP, ST	Kasi Rehabilitasi	Anggota
	SEKRETARIAT		
12.	ANGGUN ANANTHA, SE	Kasubag Program	Koordinator I (LKjIP, LKPJ, LPPD)
13.	REZA MAHAR DINI, SE	Kasubag Keuangan	Koordinator II (Laporan Keuangan)
14.	ILHAM MIZATI, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator III (Aset & Persediaan)
15.	RIKI RISAWANDI, A.Md	Bendahara	Anggota
16.	NURUL HASANAH, SE	THL	Anggota

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR


dr. ERMON REVLIN, MPH
NIP. 19690313 200212 1 005

Lampiran 4



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Jln. Suprpto No. 03 Telp. (0752) 574647 Fax. 574647, Batusangkar 27219
Yahoo Email : bpbdtanahdatar@yahoo.co.id / Gmail : bpbdtanahdatar.trc@gmail.co.id

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

Berikut kami sampaikan tindak lanjut dari Rekomendasi Inspektorat pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan dokumen laporan kinerja untuk menampilkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, serta menampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan laporan kinerja dilengkapi dengan grafik capaian kegiatan (BAB III Akuntabilitas Kinerja).

Pada Tahun 2025 BPBD akan melakukan penyempurnaan dokumen laporan kinerja untuk menampilkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, serta menampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan laporan kinerja dilengkapi dengan grafik capaian kegiatan

2. Evaluasi internal agar dilakukan secara berjenjang dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas kinerja.

Pada Tahun 2025 BPBD akan melakukan Evaluasi internal yang dilakukan secara berjenjang dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas kinerja

Demikian tindak lanjut ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya

Batusangkar, Januari 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR



[Signature]
dr. **ERMON REVLIN, MPH**
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690313 200212 1 005

Lampiran 5



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(B P B D)

Jln. Suprpto No. 03 Telp. (0752) 574647 Fax. 574647, Batusangkar 27219
Yahoo Email : bpbd_tanah_datar@yahoo.co.id / Gmail : bpbdtanahdatar.trc@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
Nomor : 000.8.6.3 /03/BPBD-2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025-2029

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, Kepala Satuan Perangkat Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara dan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Daerah

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk :
- a. Perencanaan jangka menengah;
 - b. Perencanaan tahunan;
 - c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap capaian kinerja disampaikan kepada Bupati Tanah Datar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 4 Januari 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR



dr. ERMON REVLIN, MPH
NIP. 19690313 200212 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Nomor : 000.8.6.3/03/BPBD-2026
 Tanggal : 4 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

MISI 5 : Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja						Formula Penghitungan	Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang tangguh terhadap bencana melalui penguatan sistem manajemen risiko bencana yang terpadu, partisipatif dan berkelanjutan	1. Meningkatkan ketangguhan menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,30	0,32	0,35	0,37	0,40	0,42	Hasil Penilaian BNPB	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		2. Menurunkan risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar	Indeks Risiko Bencana	123,92	123,91-122,64	122,63-121,36	121,35-120,08	120,07-118,8	118,79-117,52	Hasil Penilaian BNPB	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik
		3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja 2. Survei Kepuasan Masyarakat	BB (72) 98,30	BB (72,5) 98,35	BB (73) 98,40	BB (73,5) 98,45	BB (74) 98,50	BB (74,2) 98,55	Hasil Evaluasi Tim AKIP Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		4. Terwujudnya Inovasi yang berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	1	1	1	1	Jumlah inovasi yang dikembangkan	BPBD

KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN TANAH DATAR



dr. ERMON REVLIN, MPH
 NIP.19690313 200212 1 005